

Strategi Pengelolaan SDM Dalam Upaya Implementasi Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Candi

Oleh:

MOHAMMAD SOKHEH
PEMBIMBING : SRIYONO

Magister Manajemen
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Juni 2026



Pendahuluan

Reformasi Birokrasi merupakan upaya melakukan perubahan secara mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan guna menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dijelaskan bahwa Reformasi Birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata Kelola Pemerintah Indonesia. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan, menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi, meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua tugas organisasi, menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.[12]

Reformasi Birokrasi dapat dimulai pada perubahan-perubahan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas, integritas, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), ketatalaksanaan, dengan melakukan perbaikan proses kerja dan prosedur agar lebih efektif efisien, termasuk pemanfaatan teknologi, pola pikir (mindset) dan perilaku pegawai melalui pembiasaan pola pikir aparatur yang melayani, proaktif, dan berintegritas.

- Dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Sidoarjo. Obyek PEKPPP terdapat pada enam aspek yakni Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi yang kemudian disebut sebagai Indeks Pelayanan Publik.

Pendahuluan

Tabel 1.1 Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Candi

NO	TAHUN	NILAI	KATEGORI	SUMBER (Surat SEKDA)
1	2022	3,46	B- (Baik dengan catatan)	No: 067/18125/438.1.3.1/2022, tgl 27 Des 2022 [14]
2	2023	3,78	B (Baik)	No:000.8/1033/438.1.3.1/2024, tgl 19 Jan 2024 [15]
3	2024	4,135	A. (Sangat baik)	No:000.8.3.4/996/438.1.3.1/2025, tgl 24 Jan 2025 [16]

Dari Tabel 1.1 Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Candi di atas, hasil penilaian PEKPPP Kecamatan Candi menunjukkan bahwa terdapat tren positif atau kenaikan dari B- (Baik dengan catatan) hingga meraih nilai A- (Sangat baik). Hal ini menjadi motivasi untuk meraih indeks pelayanan Publik dengan kategori A atau Pelayanan Prima untuk Tahun Berikutnya.

Pendahuluan

Tabel 1.2 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 Kecamatan Candi

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai		
		Bobot	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	26,38	24,02
2	Pengukuran kinerja	30	22,71	24,88
3	Pelaporan Kinerja	15	12,43	12,36
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,63	17,63
Nilai Hasil Evaliasi		100	78,15	78,88
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Berdasarkan Surat Bupati Sidoarjo Nomor:700/1996/438.4/2025, tanggal 14 Februari 2025, perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Kecamatan Candi [13] seperti tercantum pada Tabel 1.2 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 Kecamatan Candi di atas. menunjukkan adanya selisih nilai yang kecil antara hasil Evaluasi AKIP tahun 2023 dan tahun 2024 dengan predikat tetap yakni BB (Sangat Baik).

Dari Tabel 1.2. tersebut juga nampak adanya penurunan nilai pada perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja. Hal ini mendorong agar segera dilakukan evaluasi internal untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Candi.

Pendahuluan

Teori Jack Bologne /Teori GONE [20] menjelaskan bahwa penyebab korupsi antara lain

- a. Greed (Keserakahan) merupakan sifat alami manusia yang berkaitan dengan karakter pelaku korupsi. Oleh karena itu, untuk mencegahnya perlu dibatasi oleh regulasi.
- b. Opportunity (Kesempatan). Tindakan korupsi terjadi karena ada kesempatan pada suatu Lembaga, organisasi, maupun masyarakat. Oleh karena itu perlu regulasi untuk menutup peluang pelaku untuk melakukan korupsi.
- c. Needs (Kebutuhan), Alasan pemenuhan kebutuhan merupakan pendorong utama seseorang melakukan korupsi, hal ini terkait dengan ketidakmampuan mengendalikan diri atas keinginan.
- d. Expose (Pengungkapan). Tindakan korupsi meskipun telah terjadi jika tidak terungkap maka seolah-olah tidak terjadi apa-apa, oleh karena itu dikatakan korupsi jika kejadian tersebut mengalami Pengungkapan.

$GONE \Rightarrow GREED + OPPORTUNITY + NEED + EXPOSE = CORRUPTION$

Dalam upaya mencapai WBK dan WBBM, maka Instansi pemerintah harus mengimplementasikan perubahan pada enam area berikut: manajemen perubahan (perubahan pola pikir dan budaya kerja), penataan Tata Laksana (Perbaikan sistem dan prosedur kerja/SOP), penataan Manajemen SDM (peningkatan kualitas sumber daya manusia/SDM), penguatan Akuntabilitas Kinerja (peningkatan pertanggungjawaban kinerja/Penilaian Kinerja), penguatan Pengawasan (Pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah penyimpangan), serta peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (peningkatan mutu layanan kepada masyarakat). [20][21]

Pendahuluan

Tabel 1.3. Perbandingan Komponen Penilaian PEKPPP dan ZONA INTEGRITAS

NO	PENILAIAN	
	6 Aspek PEKPPP PERMENPANRB No.29 Tahun 2022 [19]	6 Area Perubahan ZONA INTEGRITAS PERMENPANRB No.90 Tahun 2021 [18]
1	Kebijakan Pelayanan	Penguatan Akuntabilitas Kinerja
2	Profesionalisme SDM	Penataan Manajemen SDM
3	Sarana Prasarana	Penataan Tata Laksana
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5	Konsultasi dan Pengaduan	Penguatan Pengawasan
6	Inovasi	Manajemen Perubahan

Dari Tabel 1.3. Perbandingan Komponen Penilaian 6 Aspek PEKPPP yang tertuang dalam PERMENPANRB No.29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik [19] dan 6 Area Perubahan Zona Integritas yang tertuang dalam PERMENPANRB No.90 Tahun 2021 Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah [18] di atas terdapat banyak kesamaan sehingga hasil Penilaian PEKPPP menjadi modal kuat untuk pencapaian Zona Integritas Pemerintah Kecamatan Candi sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pendahuluan

- Pada bulan April tahun 2023, Pemerintah Kecamatan Candi telah melakukan Pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh Organisasi Pembina Zona Interitas yakni Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yang dihadiri pula oleh seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Candi untuk melakukan penandatanganan komitmen bersama dalam mengimplementasikan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kecamatan Candi. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan dan komitmen bersama seluruh komponen Pemerintah Kecamatan Candi untuk mewujudkan Pemerintah yang ber-Zona Integritas.

Pendahuluan

Tabel 1.4 Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas
Pada Pemerintah Kecamatan Candi Tahun 2026 oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo

No	Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Nilai Min
	PENGUNGKIT	80.00					Kategori
1	Manajemen Perubahan	8.00	1.84	0.67	2.51	31.38	Tidak Lulus
2	Penataan Tata Laksana	7.00	1.49	0.50	1.99	28.36	Tidak Lulus
3	Penataan Sistem SDM	10.00	2.46	0.75	3.21	32.09	Tidak Lulus
4	Penguatan Akuntabilitas	10.00	2.05	2.83	4.88	48.80	Tidak Lulus
5	Penguatan Pengawasan	15.00	1.66	1.25	2.91	19.39	Tidak Lulus
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10.00	2.35	2.50	4.85	48.47	Tidak Lulus
	Total Pengungkit				20.34	33.99	Tidak Lulus

No	HASIL			40.00			
	1	BIRORASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22.50			
		a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi	17.50	0.00	0.00	Tidak Lulus
		b	Capaian Kinerja lebih baik dari sebelumnya	5.00	1.25	25.00	Tidak Lulus
	II	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17.50	0.00	0.00	
			Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal	17.50	0.00	0.00	Tidak Lulus
			Indeks Persepsi kuitas pelayanan Publik				
			TOTAL HASIL		1.25	3.13	
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS				21.59	Tidak Lulus		

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimanakah Strategi Pengelolaan SDM
Dalam Upaya Implementasi Zona Integritas
Wilayah Bebas Dari Korupsi
Di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Candi ?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif [3] dengan Teknik Pengumpulan data melalui :

1. Dokumentasi, yakni pengumpulan dokumen-dokumen primer dan sekunder yang mendukung penelitian, antara lain :
 - a. Pengumpulan regulasi terkait PEKPPP dan Zona Integritas
 - b. Pengumpulan dokumen artikel/jurnal penelitian sejenis,
 - c. Pengumpulan dokumen-dokumen terkait Kecukupan Data PEKPPP dan Zona Integritas,
2. Observasi langsung di Kantor Kecamatan Candi terkait Pelaksanaan PEKPPP, Zona Integritas dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Candi dalam pelaksanaan PEKPPP dan Zona Integritas, serta
3. Wawancara kepada stakeholder yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.
4. Uji Validitas Dalam penelitian kualitatif konsep validitas eksternal berhubungan dengan kemungkinan perbandingan dengan hasil- hasil studi lain dan untuk dapat dilakukan perbandingan oleh peneliti lain. Dalam Penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis SWOT dengan Teori Jack Bologne (Teori GONE), Hasil analisis SWOT dengan hasil FGD, Hasil literatur review dengan hasil FGD
5. Key Informan merupakan narasumber kunci yang diharapkan mampu memberi informasi secara tepat guna menghasilkan data akurat sehingga memberikan hasil penelitian yang akurat juga. Key Informan dalam penelitian ini antara lain :
 - a. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Sidoarjo selaku Pimpinan dari Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam Penilaian PEKPPP dalam hal ini diwakilkan kepada staf an. Heru Susanto, ST
 - b. Inspektur Kabupaten Sidoarjo selaku kepala Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam penilaian Zona Integritas dalam hal ini diwakilkan kepada staf an. Timur Kartika S,S.kom dan PIC Zi an. Yunita Hastowo A.Ma
 - c. Camat Candi
 - d. Pegawai Pelaksana Layanan di Kecamatan Candi
 - e. Pegawai Pelaksana urusan Kepegawaian
 - f. Masyarakat Umum pengguna layanan Kecamatan Candi

Metode penentuan sampling pada penelitian ini menggunakan Purposive Sampling (Judgment Sampling) dengan menentukan secara langsung stakeholder terkait yang diwawancarai (sebagai key informan), baik yang terlibat secara langsung maupun tidak. Hasil wawancara ini dilakukan dokumentasi hasil wawancara, dilanjutkan dengan labeling dan reduksi data yang tidak mendukung penelitian

6. Teknik analisis data menggunakan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats) [11], yakni mengukur Kekuatan dan Kelemahan yang berasal dari dalam (internal) maupun Peluang dan Ancaman yang berasal dari luar (eksternal) dalam suatu organisasi. Dari data dokumentasi, hasil observasi, serta hasil wawancara dituangkan dalam Tabel SWOT sehingga terlihat Kekuatan dan Peluang yang dapat memberikan motivasi untuk mencapai tujuan, serta menggunakan data Kelemahan dan Ancaman untuk mencari solusi agar tujuan tetap tercapai.

Hasil

Untuk mempercepat pencapaian predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pemerintah Kecamatan Candi, disarankan menerapkan beberapa langkah strategis antara lain pembentukan pokja khusus berbasis sinergi yakni membagi tugas pegawai beradsarkan 6 area perubahan ZI untuk mempermudah pengumpulan data. Selain itu, peningkatan komunikasi internal dan manajemen konflik secara berkala dan transparan untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya pencapaian ZI guna mereduksi konflik internal akibat beban kerja tambahan. Optimalisasi asistensi bersama inspectoral sangatlah penting untuk mengetahui progress capaian secara berkala menuju Zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi.

Pembahasan

A. Analisis kondisi Eksisting Kinerja dan pelayanan Publik

Berdasarkan data Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Pemerintah Kecamatan Candi, terdapat tren perkembangan yang sangat positif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai Indeks Pelayanan Publik 3,46 dengan kategori B- (Baik dengan catatan), pada tahun 2023 meningkat menjadi 3,78 dengan kategori B (Baik), dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan yakni 4,135 dengan kategori A- (Sangat Baik).

Namun capaian Indeks Pelayanan Publik belum selaras dengan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yakni adanya penurunan komponen penilaian pada aspek perencanaan kinerja dari 26,38 menjadi 24,02 serta aspek pelaporan kinerja dari 12,43 menjadi 12,36. Hal ini menunjukkan tanda bahaya, bahwa penurunan pada aspek perencanaan dan pelaporan mengindikasikan adanya kendala struktural dalam hal administrasi kinerja dan integrasi sistem kerja yang membutuhkan evaluasi internal segera.

Ketidakselarasan ini juga berdampak fatal pada pemenuhan kriteria Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Berdasarkan hasil Evaluasi oleh Inspektorat kabupaten Sidoarjo per Mei 2026 Pemerintah Kecamatan Candi dinyatakan "Tidak Lulus" Zona Integritas, dengan nilai Kumulatif yang sangat rendah yakni 21,59 dari bobot komponen pengungkit 80,00. Seluruh area perubahan (Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan pengawasan, Peningkatan kualitas pelayanan publik) mendapatkan predikat "Tidak Lulus". Hal ini bukan disebabkan oleh kualitas pelayanan yang buruk, melainkan belum terpenuhinya kecukupan data dukung administrasi yang dibutuhkan oleh inspektorat untuk penilaian.

Pembahasan

B. Rincian dan Hasil Analisis SWOT

- Kekuatan (*Strength*). Yang menjadi kekuatan bagi pemerintah kecamatan Candi adalah tren positif pencapaian Indeks Pelayanan Publik yang terus meningkat setiap tahunnya, keberhasilan mempertahankan capaian AKIP dengan predikat sangat baik, serta kesamaan indikator penilaian PEKPPP dengan aspek penilaian ZI menjadi modal dasar pengungkit ZI.
- Kelemahan (*Weakness*) dipicu oleh data dukung administrasi yang tidak tersedia dengan baik dan lengkap oleh Pemerintah Kecamatan Candi sehingga nilai yang diperoleh sangat minim. adanya penurunan capaian nilai pada komponen perencanaan dan pelaporan hasil evaluasi AKIP menunjukkan penurunan kualitas manajemen organisasi, serta rendahnya capaian nilai pengungkit Zi yang rata-rata masih dibawah 50%.
- Peluang (*Opportunity*) yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Candi yakni adanya Camat baru yang memberikan momentum politik dan manajerial kuat melalui komitmen *Top-Down* untuk menerapkan Zona Integritas. Adanya dukungan penuh dari organisasi Pembina (inspektorat kabupaten Sidoarjo) serta keterlibatan seluruh Kepala Desa Se Kecamatan Candi yang telah menandatangani Komitmen bersamasejak April 2023. Adanya dorongan terstruktur dari peneliti untuk mengkombinasikan modal komitmen pimpinan dengan aksi nyata pemenuhan data di tingkat pelaksana.
- Ancaman (*Threat*) yang ada di pemerintah Kecamatan Candi adalah resiko hilangnya motivasi kerja aparatur sipil negara akibat kegagalan berulang dalam penilaian formal, baik dalam penilaian AKIP, PEKPPP, maupun ZI

Pembahasan

Berikut pembahasan terkait Kombinasi Strategi SWOT

- **Strategi S + O** (Menggunakan Kekuatan untuk Menangkap Peluang) dengan memanfaatkan tren positif Indeks pelayanan publik A- dan Predikat AKIP BB untuk mengkonversi dokumen-dokumen pelayanan tersebut menjadi data dukung formal ZI dengan komitmen penuh Camat yang baru, yakni sinergi antara 6 aspek PEKPPP dan 6 Area perubahan ZI sebagai dasar pembagian tugas kelompok kerja/pokja.
- **Strategi S + T** (Menggunakan Kekuatan untuk Menghadapi Ancaman), dengan menggunakan tingkat profesionalisme SDM dan budaya Pelayanan yang sudah baik untuk menutup celah *opportunity* Tindakan korupsi melalui digitalisasi dan transparansi pelayanan.
- **Strategi W + O** (Meminimalkan Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang) dengan memanfaatkan asistensi dan pembinaan dari Inspektorat Kabupaten Sidoarjo guna mengatasi ketidakcukupan data dengan kontrol langsung Camat Candi.
- **Strategi W + T** (Meminimalkan Kelemahan dan Menghadapi Ancaman) melalui evaluasi internal secara ketat dan berkala untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pelaporan kinerja yang menurun sekaligus memutus mata rantai pendorong korupsi melalui pengawasan melekat

Pembahasan

C. Analisis Strategi Pengelolaan SDM berdasarkan Teori

- Teori Gole (Jack Bologne) menjelaskan bahwa korupsi dipicu oleh empat faktor, yakni *Greed* (Keserakahan), *Opportunity* (Kesempatan), *Needs* (Kebutuhan), *Expose* (Pengungkapan). Strategi pengelolaan SDM di Kecamatan Candi harus diarahkan untuk mengintervensi faktor tersebut. *Greed* dan *Needs* bersifat personal-individual diatasi melalui penataan Sistem SDM, pembinaan mental, perbaikan pola pikir agar berorientasi melayani. Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Expose* bersifat sistemik harus diintervensi melalui penataan tata laksana (SOP yang jelas) serta penguatan pengawasan yang efektif untuk mencegah penyimpangan.
- diperlukan manajemen perubahan dalam pengelolaan SDM dengan pendekatan secara dinamis. Untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja di Kecamatan Candi, perlu adanya strategi antara lain memberikan pemahaman yang jelas kepada seluruh pegawai tentang tujuan pergeseran tata Kelola menuju ZI, keterlibatan secara aktif semua komponen dalam organisasi, serta adanya evaluasi dan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku.
- Di sisi lain, transisi menuju ZI seringkali memicu konflik akibat tuntutan beban kerja administrasi baru. Teori manajemen konflik menekankan pentingnya memahami akar masalah yakni ketidaktahuan pegawai mengenai cara pemenuhan data. Solusinya adalah komunikasi internal yang efektif dengan mengedepankan prinsip transparansi

Pembahasan

D. Formulasi Strategi Pengelolaan SDM Menuju Zona Integritas

- Langkah utama yang harus dilakukan oleh pemerintah kecamatan Candi adalah mengintegrasikan pendekatan *Bottom Up* dan *Top Down* secara seimbang. komitmen *Top Down* dari Camat Candi selaku pimpinan baru harus diwujudkan dalam pembentukan Kelompok Kerja (pokja) Penilai mandiri Pelaksanaan Zona Integritas yang dipantau langsung oleh pimpinan selaku penggerak utama. Pentingnya keteladanan moral dan jaminan Sumber Daya guna perbaikan pengelolaan administrasi.
- Secara *Bottom up* para pegawai pelaksana layanan dan urusan kepegawaian dilibatkan secara aktif dalam merumuskan metode pengumpulan data dukung, mengingat hasil penilaian PEKPPP Kecamatan Candi berkategori A- (Sangat baik). Melalui penggabungan *Top Down* dan *Bottom Up*, kecamatan Candi mampu mencukupi data untuk penilaian ZI tahun berikutnya.

Temuan Penting Penelitian

Tabel 1.4 Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas
Pada Pemerintah Kecamatan Candi Tahun 2026 oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo

No	Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Nilai Min
	PENGUNGKIT	80.00					Kategori
1	Manajemen Perubahan	8.00	1.84	0.67	2.51	31.38	Tidak Lulus
2	Penataan Tata Laksana	7.00	1.49	0.50	1.99	28.36	Tidak Lulus
3	Penataan Sistem SDM	10.00	2.46	0.75	3.21	32.09	Tidak Lulus
4	Penguatan Akuntabilitas	10.00	2.05	2.83	4.88	48.80	Tidak Lulus
5	Penguatan Pengawasan	15.00	1.66	1.25	2.91	19.39	Tidak Lulus
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10.00	2.35	2.50	4.85	48.47	Tidak Lulus
	Total Pengungkit				20.34	33.99	Tidak Lulus

No	HASIL			40.00			
	1	BIRORASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22.50			
		a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi	17.50	0.00	0.00	Tidak Lulus
		b	Capaian Kinerja lebih baik dari sebelumnya	5.00	1.25	25.00	Tidak Lulus
	II	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17.50	0.00	0.00	
			Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal	17.50	0.00	0.00	Tidak Lulus
			Indeks Persepsi kuitas pelayanan Publik				
			TOTAL HASIL		1.25	3.13	
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS				21.59	Tidak Lulus		

Manfaat Penelitian

1. Mampu mengimplementasikan 6 Area Perubahan pada Zona Integritas untuk menghindari perilaku korupsi
2. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat
3. Sebagai persiapan menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Referensi

1. Sri Indrastuti.2020. Manajemen Sumberdaya Manusia Strategik. Pekanbaru : UR Press
2. Jumroh&Yoga Jusri. 2021. Implementasi Pelayanan Publik. Solok : Insan Cendekia Mandiri
3. Zuchri Abdussamad. 2021. Metode Penelitian kualitatif. Makassar : CV. Syakir Media Press
4. Daniel Adi Setya R. 2022. Manajemen Sumber Daya Manusia. Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik
5. Syafrida H.S.2022. Metodologi Penelitian.Yogyakarta : KBM Indonesia
6. Agustini Karta. 2023. Manajemen Strategik Konsep dan Implementasi. Bali : UNTRIM PRESS
7. Siti Marwiyah. 2023. Pelayanan Publik di Era Digitalisasi.
8. Irawan dkk.2024. Pengembangan SDM yang Berkelanjutan. Eureka Media
9. Angelina Sofya F. 2024. Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia. Medan : PT. Media Penerbit Indonesia
10. Djoko Soelistya. 2021. Manajemen Sumber Daya Manusia. Sidoarjo :Nizamia Learning Center
11. Hendra Cipta dan Hatamar.2020.Analisis SWOT. Bangka : Shiddiq press
12. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
13. Surat Bupati Sidoarjo Nomor:700/1996/438.4/2025, tanggal 14 Februari 2025, perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024
14. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo No: 067/18125/438.1.3.1/2022, tgl 27 Des 2022
15. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo No:000.8/1033/438.1.3.1/2024, tgl 19 Jan 2024
16. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo No:000.8.3.4/996/438.1.3.1/2025, tgl 24 Jan 2025
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah
18. PERMENPANRB No.90 Tahun 2021 Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah
19. PERMENPANRB No.29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Referensi

20. Tedd Avey, Ted Baskerville, Alan E Brill. *CPA's handbook of fraud and commercial crime prevention*. American Institute of Certified Public Accountants Historical Collection.
21. <https://mh.uma.ac.id/teori-teori-penyebab-korupsi>
22. [Suzy Yolanda Gussman, Siti Fathonah, Arif Wibawa. Analisis Community Development PT. Telkom Kandatel Yogyakarta Dalam Pengembangan UKM Melalui Program Kemitraan.](#)
23. [Juan Mejia Trejo. Designing a Digital Marketing Model Innovation to Increase the Competitiveness First Insight in Mexico.](#)
24. [I made Dody Sutrisna. Strategi Komunikasi Pimpinan Meraih Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat](#)
25. [Ria Murdiana, Meri Yarni, Syamsir. Reformasi Birikrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi \(WBK\) \(Studi Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jambi\)](#)
26. [Germana A.M Loro, Romli Arsad, Tun Heseno. Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih](#)
27. Julia Hapsari, Hartuti Purnaweni, Budu Puspo Priyadi. Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di BBWS Pemali Juana Semarang
28. Berita Acara Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas Pada Kecamatan Candi Tahun 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.
29. Buku Panduan Strategis Pembangunan Zona Integritas

